

Tantangan Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 7 Trienggadeng Pidie Jaya

Ainul Mardiah

Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email ainulmardhiah@ar-raniry.ac.id

Abstract

The implementation of inclusion education in Indonesia is not as easy as turning the palm of your hand, therefore inclusion education needs serious handling from both the government, schools, parents, and the community in general. This is also very much in line with the vision, mission and regulation of the Regent of Pidie Jaya number 29 of 2017 concerning the organizer of inclusive education in Pidie Jaya. So far, Pidie Jaya has 20 schools that provide inclusive education, one of which is SD Negeri 7 Trienggadeng. This study aims to find out the challenges of implementing inclusive education at SD Negeri 7 Trienggadeng Pidie Jaya. This research method uses a qualitative type of research with a case study approach. The data collection techniques carried out by the researcher are through observation, interviews and documentation. The research subjects consisted of the principal, special assistant teacher (GPK), and 1 classroom teacher. Based on the results of the study, it is known that the challenges faced by school principals in the implementation of Inclusion education at SD Negeri 7 Trienggadeng are; lack of human resources, lack of facilities and infrastructure, lack of cooperation between schools and parents, lack of community participation in the importance of inclusive education in schools.

Keyword: Challenges, Implementation, Inclusive Education, Primary

Schools

Abstrak

Pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan, oleh karena itu pendidikan inklusi perlu penanganan yang serius baik dari pihak pemerintah, pihak sekolah, wali murid, dan masyarakat secara umum. Hal ini juga sangat sejalan dengan visi misi dan peraturan bupati Pidie Jaya nomor 29 tahun 2017 tentang penyelenggara pendidikan inklusi di Pidie Jaya. Sejauh ini Pidie Jaya sudah memiliki 20 sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, salah satunya adalah SD Negeri 7 Trienggadeng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan pelaksanaan pendidikan inklusi di SD Negeri 7 Trienggadeng Pidie Jaya. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari kepala sekolah, guru pendamping khusus (GPK), dan 1 orang guru kelas. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Tantangan yang dihadapi kepala sekolah dalam pelaksanaan pendidikan Inklusi di SD Negeri 7

Trienggadeng adalah; kurangnya sumberdaya manusia, kurangnya sarana dan prasara, kurangnya kerjasama sekolah dan orang tua, kurangnya partisipasi masyarakat terhadap akan pentingnya Pendidikan inklusi di sekolah.

Kata Kunci: Tantangan, Pelaksanaan, Pendidikan Inklusif, Sekolah Dasar

Introduction

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga Negara Indonesia. Hak pendidikan telah diatur pada Undang Undang Dasar 1945 terutama pasal 31 ayat 1 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan". (Direktorat Pendidikan, 2011). Warga negara Indonesia mempunyai hak dalam memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, suku, agama dan jenis kelamin, kemampuan dan lain-lain. Karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (difabel). Menjawab fenomena tersebut maka muncul pendidikan inklusi.

Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, tanpa terkecuali, untuk belajar bersama di kelas reguler (Dhoka et al., 2023). Beberapa sekolah reguler tidak mau menerima mereka sebagai siswa. Alasannya guru di sekolah tersebut tidak memiliki kualifikasi yang memadai untuk membimbing anak berkebutuhan khusus. Terkadang sekolah khusus letaknya jauh dari rumah mereka, sehingga banyak anak berkebutuhan khusus yang tidak mengenyam pendidikan (Pratiwi, 2015). Pendidikan sejatinya menjadikan peserta didik menjadi individu yang lebih baik, bermartabat dan mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Namun sesuai dengan kodrat yang Allah gariskan kepada manusia, ada yang terlahir sebagai individu yang sempurna lahir dan batin, di sisi lain yang terlahir sebagai manusia "spesial" dengan segala kekurangan baik secara fisik

maupun psikis.

Penempatan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi dapat dilaksanakan berbagai model seperti: *Pertama*; Kelas Reguler Penuh yaitu model kelas reguler penuh ini anak yang berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal lainnya di kelas reguler sepanjang hari dengan menggunakan kurikulum yang sama. *Kedua*; kelas Reguler dengan Cluster. Cara ini berbeda dengan model yang pertama, yaitu anak yang berkebutuhan khusus belajar Bersama anak lain yang normal di kelas reguler dalam kelompok khusus (Fajrillah et al., 2020).

Pada tahun 1986 setelah dilakukan uji coba di beberapa sekolah umum di kota besar untuk menerima anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah reguler, maka disusunlah buku petunjuk Teknis Pendidikan Integrasi di Sekolah dasar yang kemudian disusul oleh SK Mendikbud nomor 2022/U/1986 tentang pendidikan integrasi bagi Anak Cacat (Latifah, 2020). Konsep pendidikan integrasi ini muncul setelah adanya konsep *mainstreaming* sebagai penyedia pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah atau kelas umum.

Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sangatlah dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan sosial dalam hidupnya. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan tak terkecuali bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, mereka harus mendapatkan pendidikan dengan fasilitas yang sama dengan anak-anak yang lain dan guru tidak boleh membeda-bedakan anak yang berkebutuhan dengan anak- nak yang normal (Fionita, 2024).

Dari penelitian terdahulu hanya memaparkan tentang dampak positif dari pendidikan inklusi dan penelitian sebelumnya tidak menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi oleh guru di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Penelitian sebelumnya tidak menjelaskan sama sekali efek negatif yang dialami oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus tersebut. Maka distingsi dari penelitian ini untuk

melengkapi kajian sebelumnya terkait pelaksanaan pendidikan inklusi yang diberikan kepada siswa berkebutuhan khusus dengan siswa yang normal oleh guru pendamping baik dari perhatian, perlakuan, metode serta materi pembelajaran. Demikian yang terjadi di Sekolah Dasar (SDN) 7 Trienggadeng, di mana guru kelas dan guru pendamping tidak memilah antara anak yang berkebutuhan khusus dengan anak normal dalam satu kelas dan mereka diperlakukan sama dan tidak dibedakan antara satu dengan yang lain. Fenomena ini tidak menyebabkan dampak negatif bagi anak yang berkebutuhan khusus, namun tidak demikian dari peserta didik, dimana mereka belum menerima kehadiran ABK di lingkungan sekolah. Sehingga kerap terjadinya *body shaming* dan *bullying* yang dilakukan oleh teman-temannya yang normal. Tantangan lainnya adalah bagi guru kelas yang mengalami kesulitan dalam memberi materi pelajaran karena daya serap dari mereka yang sangat berbeda. Oleh karena itu anak yang berkebutuhan khusus mereka harus diberikan remedial di luar jam pelajaran oleh guru pendamping di sekolah itu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pendidikan inklusif pada proses belajar mengajar anak yang berkebutuhan khusus dan anak yang normal di dalam satu kelas yang sama di Sekolah Dasar Negeri Trienggadeng Pidie Jaya, serta kendala yang dihadapi oleh guru kelas dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di SDN 7 Trienggadeng Pidie Jaya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data empirik tentang tantangan pelaksanaan pendidikan inklusif pada proses belajar mengajar anak berkebutuhan khusus.

Results Literature Review

Landasan hukum pelaksanaan pendidikan Inklusi

Menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat Istimewa menyatakan bahwa Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang

memiliki kelainan (Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2011) Berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 10 tentang Disabilitas serta pasal 2 ayat 2 peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas, setiap sekolah baik Negeri ataupun swasta wajib menjadi sekolah inklusif (Arifa, 2022).

Oleh sebab itu undang-undang itulah yang menjadi bukti kuat hadirnya pendidikan inklusi di tengah masyarakat (Munajah et al., 2021). Selanjutnya Undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 32 ayat 1 yang berbunyi ' pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (Arifa, 2020) Begitu juga dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2022 , Pasal 51 menyatakan bahwa, anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif atau pendidikan khusus (Nurussakinah et al., 2024).

Dari beberapa kaedah yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar dengan anak yang normal lainnya di dalam suatu kelas yang sama dan guru tidak boleh membedakan antara anak yang berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya.

Tantangan pelaksanaan pendidikan Inklusi

Sekolah inklusi sudah banyak jumlahnya di setiap wilayah, namun penyelenggaraannya masih belum optimal. Bahkan banyak dari anak yang berkebutuhan khusus mendapatkan diskriminasi dan pembulian di lingkungan sekolah. Seharusnya sekolah menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk belajar dengan teman-teman yang lain. Dan guru juga tidak boleh membedakan anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang normal lainnya mereka harus

diberikan perhatian yang sama tanpa harus dibeda-bedakan, agar anak yang berkebutuhan khusus tersebut bisa percaya diri.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusi yaitu: Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang pendidikan inklusif. Banyaknya guru dan tenaga pendidik yang belum memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan pemahaman yang cukup tentang strategi pengajaran inklusif dan cara mengelola kebutuhan pendidikan khusus di dalam kelas. Kurangnya fasilitas dan sarana pendukung yang cukup memadai juga merupakan hambatan dalam implementasi pendidikan inklusif. Banyak sekolah yang belum dilengkapi dengan aksesibilitas yang memadai, seperti kamar mandi dan toilet yang dapat diakses oleh peserta didik dengan kebutuhan khusus. Selain itu, alat bantu pendengaran, perangkat teknologi, dan sumber daya lainnya yang mendukung pembelajaran inklusif juga masih sangat terbatas (Juntak et al., 2023). Selain itu terdapat juga diskriminasi terhadap peserta didik dengan kebutuhan khusus. Terkadang masih ada pandangan negatif terhadap kemampuan mereka, yang dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam pendidikan inklusif. Kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga terkait dalam mendukung pendidikan inklusif. Diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan inklusif yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus (Juntak et al., 2023).

Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang terbuka bagi siapa saja, dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda. Jadi pendidikan inklusi ini juga bisa ditujukan untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus atau keterbatasan. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal (Sumarni, M.Si, 2019).

Pendidikan Inklusi yang dipahami di masyarakat sebagai upaya memasukkan anak berkebutruhan khusus ke sekolah reguler dalam rangka memberikan hak atas pendidikan untuk untuk semua anak, kemudahan akses pendidikan dan juga menghilangkan diskriminasi terhadap anak berkelakuan khusus (Munajah et al., 2021). Penyelenggaraan pendidikan inklusi yaitu sekolah yang telah memenuhi beberapa persyaratan di antaranya mempunyai siswa berkebutuhan khusus, dan berkomitmen terhadap terhadap pendidikan inklusif penuntasan wajib belajar ataupun terhadap terhadap komite sekolah, menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, dan mempunyai fasilitas serta sarana pembelajaran yang mudah diakses oleh semua anak (Mularsih, 2019). Pelaksanaan program pendidikan inklusi tidak memberikan perlakuan khusus maupun hak-hak istimewa bagi anak berkebutuhan khusus, akan tetapi memberikan persamaan hak dan kewajiban bagi peserta didik yang normal pada umumnya (Wijaya et al., 2023).

Direktorat pembinaan sekolah luar biasa sebenarnya telah membuat dan mengeluarkan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif yang terbagi ke dalam beberapa buku. Akan tetapi ada beberapa kendala terkait dengan buku pedoman tersebut, antara lain; pertama, buku ini bersifat umum untuk seluruh jenis anak yang berkebutuhan khusus, hambatan dan kebutuhan siswa Anak Berkelakuan Khusus sangat berbeda antara satu jenis kelainan dengan jenis lainnya, kedua, buku ini juga telah dicetak tetapi belum didistribusikan dan tersosialisasikan secara optimal kepada semua sekolah inklusif yang berkepentingan di Indonesia (Hanjarwati & Aminah, 2014). Secara khusus juga telah disahkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Secara spesifik telah disebutkan dalam UU tersebut Pada Ayat (1), bahwa penyandang disabilitas memiliki hak pendidikan yang sama dengan anak-anak lain. Dalam perwujudannya, kini telah sering kita jumpai sekolah-sekolah inklusi. Di sekolah inklusi, guru kelas merancang setting perencanaan pembelajaran, sedangkan guru pendamping khusus merupakan tenaga profesional yang berkolaborasi. Perencanaan pembelajaran yang dibuat ntuk siswa difabel berbeda

dengan peserta didik reguler (Purbasari et al., 2022).

Pendidikan inklusi dalam proses pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus juga masih menjadi tembok pemisah, dengan anak-anak normal pada umumnya, hal ini menghambat proses interaksi di antara mereka. Akibatnya anak berkebutuhan khusus menjadi kelompok yang tersingkirkan dalam interaksi sosialnya di masyarakat. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan anak berkebutuhan khusus, dan begitu pun sebaliknya, anak berkebutuhan khusus merasa bukan bagian dari kehidupan masyarakat di sekitarnya. Sekolah inklusi merupakan salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi dimana anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. (Darma & Rusyidi, 2015).

Dari beberapa pendapat yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa, penyelenggaraan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus harus menciptakan lingkungan yang ramah dan nyaman terhadap pembelajaran, agar siswa betah di dalam kelas dan terbentuk suasana yang menyenangkan.. Oleh karena itu, pendidikan inklusi juga masih jarang ditemui, khususnya di Indonesia. Padahal sudah ada aturan tentang pendidikan inklusi itu sendiri. Selain itu, pelibatan elemen-elemen yang ada pada sekolah yang didayagunakan dalam mengembangkan pendidikan inklusi juga menjadi hal yang tidak dapat disingkirkan. Untuk itulah langkah-langkah strategis kepemimpinan kepala sekolah menjadi hal yang utama. Artikel ini menguraikan secara jelas tentang tantangan pelaksanaan pendidikan inklusi di SD Negeri 7 Trienggadeng.

Sekolah Inklusi memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus agar mendapatkan pendidikan yang adil. Untuk terciptanya keberlangsungan pendidikan inklusi perlu adanya faktor pendukung yang sangat penting yaitu semua komponen ikut berpartisipasi di dalamnya seperti kepala sekolah, guru, orang tua, masyarakat, bahkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Orang dengan disabilitas memiliki

kemungkinan untuk berada di golongan ekonomi lemah. Oleh sebab itu Anak Berkelakuan khusus harus memiliki pendidikan yang layak dan berkualitas untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Methods

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan di SD Negeri 7 Trienggadeng selama 3 hari. Subjek penelitian adalah Kepala Sekolah, Guru Pendamping Khusus (GPK) dan 1 orang guru kelas. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai responden sesuai jadwal yang telah disepakati sebelumnya. Setelah proses pengumpulan data dilakukan, proses selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis dan interpretasi data merujuk pada landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya dalam mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain (Rijali, 2018). Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara langsung berkesinambungan dari awal sampai akhir proses penelitian. Untuk itu dalam menganalisis data, peneliti menggunakan tiga tahapan, yaitu; (1) mereduksi data; (2) penyajian data; (3) verifikasi data.

Results

Penyelenggaraan pendidikan inklusi tidak semudah membalikan telapak tangan. Terdapat banyak tantangan yang dihadapi baik dari dalam (internal) maupun luar sekolah (eksternal). Tantangan ini akan menjadi hambatan dalam terciptanya pendidikan inklusi yang baik. Tantangan yang dihadapi Sekolah dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di SD Negeri 7 Trienggadeng.

Adapun tantangan pelaksanaan pendidikan inklusi di SDN 7 Trienggadeng Pidie Jaya berdasarkan temuan yang peneliti lakukan adalah: hasil observasi yang

peneliti lakukan di Sekolah Dasar Negeri 7 Tienggadeng Pidie Jaya yaitu, kurangnya pemahaman dan pengalaman terhadap pendidikan inklusi yang dimiliki oleh guru kelas dan guru pendamping yang mengajar di kelas inklusi seperti belum pernah mengikuti pendidikan secara khusus untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Hal tersebut berimbas kepada minimnya kemampuan dalam pemahaman karakter anak berkebutuhan khusus, sehingga guru kelas dan dan guru pendamping khusus kesulitan dalam memahami karakteristik anak berkebutuhan khusus yang berbeda dengan anak normal lainnya. Karena kurangnya sumberdaya guru disekolah tersebut menyebabkan rentannya terjadi kasus-kasus *bullying* terhadap anak yang berkebutuhan khusus yang dilakukan oleh anak-anak normal. Dan diperkuat dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah yang menyatakan bahwa;

“Setelah melakukan sosialisasi dan rapat dengan orang tua siswa mengenai pendidikan inklusi sebagian besar dari mereka mendukung penyelenggaraan inklusi.” (wawancara dengan kepala sekolah).

Selanjutnya jawaban yang sama dari guru pendamping khusus yang mengatakan bahwa;

“Ada sebagian besar orang tua siswa yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi, terutama orang tua siswa inklusi, mereka ikut andil dalam mendampingi anaknya selama anak berada diluar lingkungan sekolah. Akan tetapi ada juga orang tua yang tidak mau bekerjasama dengan guru, ketika kami memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa anaknya berkebutuhan khusus, orang tua tersebut tidak menerima bahwa anaknya ini perlu penanganan khusus baik di sekolah atau pun di luar sekolah sehingga proses pembelajaran si anak berlangsung lama dan tidak maksimal”. (Wawancara dengan Guru Pendamping).

Selanjutnya hasil wawancara dengan guru kelas menyatakan bahwa;

“Kepala sekolah memberikan arahan dan masukan untuk saya untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, materi, metode dan media pembelajaran juga harus disesuaikan dengan kebutuhan

anak yang berkebutuhan khusus. Guru juga harus mengawasi siswa yang normal agar tidak terjadi *bulying* terhadap siswa yang berkebutuhan khusus di sekolah tersebut” (Wawancara dengan Guru Kelas).

Senada dengan pernyataan tersebut, guru pendamping khusus juga mengungkapkan bahwa;

”Anak berkelakuan khusus (ABK) harus diberikan perhatian yang lebih dalam proses pembelajaran di dalam kelas, karena mereka tidak sama menyerap materi pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Dan akan sangat berbeda dengan anak normal lainnya di dalam kelas” (Wawancara dengan Guru Pendamping Khusus).

Hambatan tersebut disinyalir dapat menghambat proses belajar dalam sekolah inklusi. Tantangan tersebut dialami oleh kepala sekolah dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di SD Negeri 7 Trienggadeng antara lain, dari segi penanganan siswa berkebutuhan khusus dikarenakan siswa berkebutuhan khusus di SD Negeri 7 Trienggadeng lumayan banyak sehingga guru pendamping khusus (Gpk) sedikit kewalahan menanganinya, baik dari segi pengontrolan maupun perhatian khusus yang harus diberikan. Kemudian sulitnya memberi pemahaman kepada orang tua siswa, karena ada beberapa orang tua dari anak berkebutuhan khusus yang tidak mau mendukung dan mendampingi anaknya belajar dirumah bahkan mereka tidak mau anaknya digolongkan sebagai anak berkebutuhan khusus karena masih ada faktor malu ketika nanti anaknya disebut anak berkebutuhan khusus, menurut mereka anak berkubutuhan khusus adalah label yang kurang baik dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam memberikan pemahaman dan meminta kerja sama dengan orang tua siswa, pihak sekolah benar-benar menjaga emosional orang tua agar mau mendukung dan mendampingi proses pembelajaran anaknya, karna waktu belajar di sekolah sangat singkat, dengan demikian pendampingan orang tua dirumah sangat diperlukan. Pendidikan inklusi menjadi prioritas dalam sistem pendidikan nasional.

Ada beberapa hambatan yang dialami oleh guru pendamping khusus diantaranya adalah, kurangnya pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan

kompetensi diri, kurangnya kerja sama dengan lembaga terkait mengenai sekolah inklusif, kurangnya kerja sama antara guru dan wali murid mengenai sekolah inklusif, kurangnya sarana dan prasarana yang di sediakan untuk anak berkebutuhan khusus.

Jadi, SD N 7 Trienggadeng merupakan salah satu Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Pidie Jaya yang ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi seperti yang termuat dalam peraturan bupati No 29 Tahun 2017. Penyelenggaraan pendidikan inklusi merupakan bentuk upaya pemerintah yang diharapkan mampu mencetak generasi penerus yang dapat memahami dan menerima segala bentuk perbedaan dan tidak boleh ada diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus dan guru di dalam proses belajar mengajar tidak boleh membedakan anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang normal. dalam kehidupan masyarakat ke depannya. Di beberapa kota di Indonesia pun sudah muncul sekolah inklusi yang pelaksanaannya atas kerjasama sekolah dan pemerintah kota. Akan tetapi pada kenyataannya masih sulit mewujudkan sekolah inklusi yang dapat memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus tersebut. Salah satu bentuk kesulitan tersebut adalah masih adanya masyarakat yang belum menerima adanya siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler, Selain itu juga ketidakharmonisan antar berbagai pihak dalam pelaksanaan sekolah inklusi, seperti di perlukannya guru yang berkualitas dan pihak sekolah yang baiknya mendukung penuh pelaksanaan.

Selain itu, kepala sekolah juga menjelaskan bahwa, pelibatan elemen-elemen yang ada pada sekolah yang didayagunakan dalam mengembangkan pendidikan inklusi juga menjadi hal yang tidak dapat disingkirkan. Untuk itulah langkah-langkah strategis kepemimpinan kepala sekolah menjadi hal yang utama. Artikel ini menguraikan secara jelas tentang tantangan yang dihadapi oleh kepala sekolah dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di SD Negeri 7 Trienggadeng. Sekolah Inklusi memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus agar mendapatkan pendidikan yang adil. Agar terciptanya keberlangsungan pendidikan inklusi perlu adanya faktor pendukung yang sangat penting yaitu semua komponen ikut

berpartisipasi di dalamnya seperti kepala sekolah, guru, orang tua, masyarakat, bahkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru kelas dan guru pendamping khusus di Sekolah Dasar Negeri 7 Trienggadeng Pidie Jaya menemukan bahwa anak berkebutuhan khusus mendapatkan materi yang sama, metode pengajaran yang sama dengan anak yang normal, namun perhatian yang diberikan oleh guru pendamping khusus yang berbeda dengan anak normal lainnya. Karena guru pendamping khusus mereka sudah mendapat pelatihan khusus dalam menangani anak berkebutuhan khusus di sekolahnya.

Conclusion

Pendidikan inklusi bisa dimewujudkan jika ada kerjasama yang baik antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dalam hal ini pendidikan inklusi dirintis menuju pendidikan yang holistik, merata, adil dan memperdayakan generasi untuk menghadapi berbagai macam tantangan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri 7 Trienggadeng Pidie Jaya memiliki beberapa hambatan diantaranya yaitu; kurangnya sumberdaya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya dana yang disediakan oleh pemerintah, kurangnya kerja sama orang tua dan masyarakat terhadap akan pentingnya pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah. Sehingga pelaksanaan pendidikan inklusi tidak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.

REFERENCES

- Arifa*, F. N. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64-72. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719>
- Arifa, F. N. (2020). *Tantangan Dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif*. XVI(3), 21-25.
- Darma, I. P., & Rusyidi, B. (2015). Pelaksanaan Sekolah Inklusi Di Indonesia. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 223-227. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13530>

- Dhoka, F. A., Poang, F., Dhey, K. A., & Lajo, M. Y. (2023). Pendidikan Inklusi Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Sosial Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1), 20–30.
<https://doi.org/10.38048/jpicb.v1i1.2109>
- Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. (2011). Pedoman umum penyelenggaraan pendidikan insklusif. *Departement Pendidikan Nasional*, 70, 1–36.
- Fajrillah, Mashadi, Zakiah, Nurjismi, & Jannah, M. (2020). Persepsi Guru Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di Pidie Jaya. *Urnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 1(1), 17.
- Fionita, W. (2024). Implementasi Pendidikan Inklusif Sebagai Perubahan Paradigma Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI)*, 2(2), 302–311. <https://doi.org/10.36456/bp.vol15.no27.a1790>
- Hanjarwati, A., & Aminah, S. (2014). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Mengenai Pendidikan Inklusi. *Inklusi*, 1(2), 221.
<https://doi.org/10.14421/ijds.010206>
- Juntak, J. N. S., Rynaldi, A., Sukmawati, E., Arafah, M., & Sukomardojo, T. (2023). Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua: Studi Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 5(2), 205–214.
<https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i2.26904>
- Latifah, I. (2020). Pendidikan Segregasi, Mainstreaming, Integrasi dan inklusi, apa bedanya? *Jurnal Pendidikan*, 29(2), 101–108.
<https://doi.org/10.32585/jp.v29i2.676>
- Mularsih, H. (2019). Gambaran Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar Negeri Di Jakarta Barat. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 3(1), 94–104. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i1.3600>
- Munajah, R., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Cakrawala Repositori IMWI*, 5(3), 1183–1190.
<https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i4.384>
- Nurussakinah, T., Mulyadi, S., & Gandana, D. G. (2024). Menyongsong Masa Depan: Survei Implementasi Pendidikan Inklusi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini. *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 389–403.
<https://doi.org/10.37985/murhum.v5i1.563>
- Pratiwi, J. C. (2015). Sekolah Inklusi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus : Tanggapan Terhadap Tantangan Kedepannya. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan "Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi,"* 1

(2)(November), 237-242.

- Purbasari, Y. A., Hendriani, W. H., & Yoenanto, N. H. (2022). Perkembangan Implementasi Pendidikan Inklusi. *Jurnal Pendidikan (Teori Dan Praktik)*, 7(1), 50-58. <https://doi.org/10.26740/jp.v7n1.p50-58>
- Rijali, A. (2018). No Title Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 13-14.
- Sumarni, M.Si, S. (2019). Pengelolaan Pendidikan Inklusif di Madrasah. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 17(2), 148-161. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v17i2.631>
- Wijaya, S., Supena, A., & Yufiarti. (2023). Implementasi Program Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar di Kota Serang. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(1), 347-357. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i1.4592>